

PENGARUH DEMOKRASI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KENEGARAAN DI INDONESIA

Wilma Silalahi ¹, Michael Isakhar Tannuwidjaja ²

Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara

Correspondence		
Email: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id ¹ , michael.205250293@stu.untar.ac.id ²	No. Telp:	
Submitted: 30 September 2026	Accepted: 1 Oktober 2026	Published: 2 Oktober 2026

ABSTRACT

Democracy and law enforcement are two interrelated elements in the administration of the state in Indonesia. Democracy provides opportunities for citizens to participate in government, express their aspirations, and monitor the administration of the state, while law serves as the basis and limitation for the exercise of power. This study aims to examine the implementation of democratic principles in law enforcement in Indonesia and to analyze the influence of democracy on law enforcement as well as the challenges encountered in its implementation. This study uses a qualitative method with a literature study approach. The data used are secondary data obtained from academic journals, books, documents, laws and regulations, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and other relevant official sources. The data were analyzed descriptively to examine the relationship between democracy and law enforcement. The results show that democracy influences law enforcement through public participation, oversight, and limitations on state power. However, its implementation still faces various challenges, including consistency in law enforcement, the independence of law enforcement institutions, oversight of power, and public participation. Therefore, strengthening legal institutions, transparency, accountability, oversight, and public participation is necessary so that democracy and law enforcement can operate in balance in accordance with the principles of the rule of law in Indonesia.

Keywords: *democracy, law enforcement, public participation, limitation of power, rule of law*

ABSTRAK

Demokrasi dan penegakan hukum merupakan dua unsur yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menyampaikan aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, sedangkan hukum berfungsi sebagai dasar dan batas dalam menjalankan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip demokrasi dalam penegakan hukum di Indonesia serta menganalisis pengaruh demokrasi terhadap penegakan hukum dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta sumber resmi lainnya yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif untuk memahami hubungan antara demokrasi dan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi berpengaruh terhadap penegakan hukum melalui partisipasi masyarakat, pengawasan, serta pembatasan terhadap kekuasaan negara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti konsistensi penerapan hukum, independensi lembaga penegak hukum, pengawasan terhadap kekuasaan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan lembaga hukum, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar demokrasi dan penegakan hukum dapat berjalan secara seimbang sesuai dengan prinsip negara hukum di Indonesia.

Kata kunci: *demokrasi, penegakan hukum, partisipasi masyarakat, pembatasan kekuasaan, negara hukum.*

A. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki peran penting dalam proses penyelenggaraan negara melalui berbagai bentuk partisipasi, seperti pemilihan umum, penyampaian pendapat, serta keterlibatan dalam kehidupan sosial dan politik. Indonesia menerapkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan proses pemilihan pemimpin, tetapi juga bagaimana kekuasaan negara dijalankan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, demokrasi dan hukum merupakan dua hal yang saling berkaitan, terutama dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Hukum menjadi aturan yang digunakan oleh pemerintah atau otoritas untuk mengatur perilaku masyarakat serta hubungan antara individu dengan individu maupun antara individu dengan negara. Dengan adanya hukum, pelaksanaan demokrasi memiliki dasar dan batas yang jelas sehingga kehidupan bernegara dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. (Sembiring, 2023)

Indonesia tidak hanya menerapkan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, tetapi juga merupakan negara hukum. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sebagai negara hukum, penyelenggaraan kehidupan bernegara harus didasarkan pada aturan dan konstitusi yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan, membatasi kekuasaan, memberikan kepastian hukum, serta menjamin hak dan kewajiban masyarakat. Dengan demikian, prinsip demokrasi dan negara hukum saling berkaitan dalam memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat, tetapi tetap berada dalam batas-batas hukum yang telah ditentukan. (Subechi, 2012)

Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam pelaksanaan prinsip negara hukum karena berkaitan dengan proses penerapan peraturan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup penerapan hukum yang adil, konsisten, serta memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, baik melalui upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun upaya represif untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum membutuhkan lembaga yang menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan hukum serta memiliki mekanisme pengawasan agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Irawan *et al.*, 2025)

Indonesia merupakan negara demokrasi karena pemegang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Prinsip kedaulatan rakyat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan penegakan hukum karena pelaksanaan demokrasi membutuhkan hukum sebagai dasar dalam mengatur dan membatasi kekuasaan negara. Melalui demokrasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam pemerintahan, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Sementara itu, hukum berfungsi sebagai batas agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, hubungan antara demokrasi dan penegakan hukum menjadi penting karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan adanya partisipasi masyarakat, tetapi juga bagaimana kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum serta bagaimana hak-hak masyarakat mendapatkan perlindungan. (Muhlashin, 2021)

Pelaksanaan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kualitas kehidupan demokrasi. Tantangan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan, independensi lembaga penegak hukum,

partisipasi masyarakat, serta konsistensi dalam menerapkan peraturan. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi dan penegakan hukum perlu berjalan secara seimbang agar penyelenggaraan negara tetap berlandaskan konstitusi dan hukum yang berlaku. Dalam ruang lingkup demokrasi, sejumlah tantangan serius juga masih perlu diperhatikan agar prinsip-prinsip demokrasi dapat diterapkan secara baik dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas pengaruh demokrasi terhadap penegakan hukum kenegaraan di Indonesia dengan melihat penerapan prinsip demokrasi, hubungan antara demokrasi dan penegakan hukum, serta berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. (Prayoga, 2026)

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan prinsip demokrasi dalam penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh demokrasi terhadap penegakan hukum serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen, publikasi pemerintah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, situs web, serta sumber resmi lainnya yang berkaitan dengan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari, membaca, memahami, dan mengkaji berbagai dokumen serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk membahas penerapan prinsip demokrasi, pengaruh demokrasi terhadap penegakan hukum, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia. (Undari and Mohamad, 2024)

D. PEMBAHASAN MASALAH

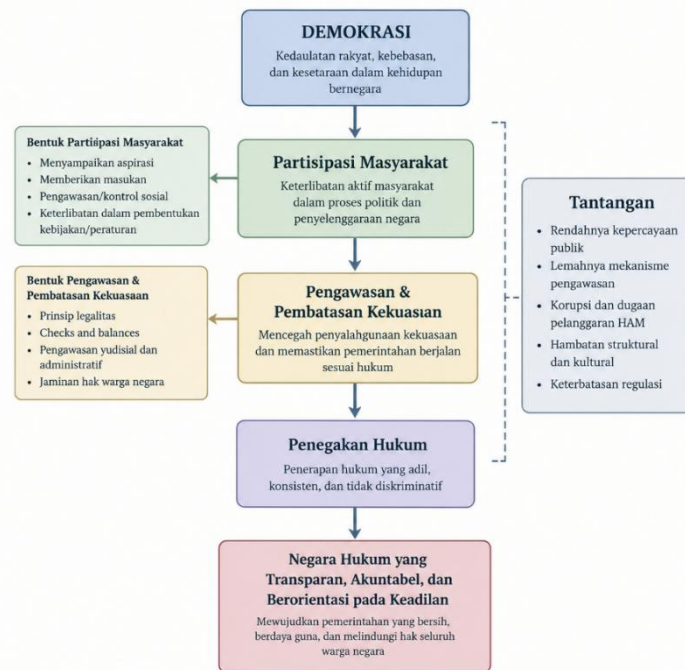
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga keputusan dalam kehidupan bernegara idealnya memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Salah satu hal penting dalam pelaksanaan demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat, yang tidak hanya dilakukan melalui pemilu atau pilkada, tetapi juga melalui keterlibatan dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penerapannya pada penegakan hukum, prinsip demokrasi dapat terlihat dari adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, serta mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Partisipasi masyarakat tersebut tetap perlu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar pelaksanaan demokrasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dan pembatasan terhadap kekuasaan, penegakan hukum diharapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan konstitusi, serta mendukung terciptanya penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, dan adil. (Rahmaayu *et al.*, 2025)

Dalam pelaksanaannya, hubungan antara demokrasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti konsistensi dalam penerapan hukum, independensi lembaga penegak hukum, pengawasan terhadap kekuasaan, serta partisipasi masyarakat. Hubungan antara hukum, politik, dan demokrasi juga tidak dapat dipisahkan karena kegiatan politik dalam kehidupan bernegara tetap diatur dan harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, politik juga dapat memengaruhi pembentukan hukum

karena hukum merupakan hasil dari berbagai kepentingan dan kehendak politik yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, hubungan antara hukum dan politik dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu *das sollen* yang menekankan bagaimana hukum seharusnya dijalankan berdasarkan aturan dan kepentingan masyarakat, serta *das sein* yang melihat bagaimana hubungan tersebut berlangsung dalam kenyataan. Adanya berbagai kepentingan dalam kehidupan politik dan pemerintahan dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, penerapan demokrasi perlu disertai dengan penguatan lembaga hukum, transparansi, pengawasan, serta partisipasi masyarakat agar hukum dapat diterapkan secara konsisten dan tetap sesuai dengan prinsip negara hukum. (Dharmasisya and Fakultas, 2022)

Dalam pelaksanaannya, hubungan antara demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan konsistensi dalam penerapan hukum, independensi lembaga penegak hukum, pengawasan terhadap kekuasaan, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Selain itu, adanya berbagai kepentingan dalam kehidupan politik dan pemerintahan juga dapat menjadi tantangan dalam menciptakan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, penerapan demokrasi perlu disertai dengan penguatan lembaga hukum, transparansi, pengawasan terhadap kekuasaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar hukum dapat diterapkan secara konsisten dan penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. (Prayoga, 2026)

Politik hukum merupakan kebijakan yang ditempuh oleh negara melalui lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk menentukan hukum yang perlu diatur agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib. Politik hukum juga memiliki keterkaitan dengan hukum nasional karena kebijakan yang dibuat diharapkan dapat mendukung tegaknya supremasi hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran. Dalam kaitannya dengan demokrasi, penegakan hukum dapat dipengaruhi melalui adanya pembatasan kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan terhadap lembaga negara. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan negara tidak seharusnya dijalankan tanpa batas karena terdapat konstitusi dan hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat juga memiliki kesempatan untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan serta menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penegakan hukum dalam lingkungan demokratis tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan, tetapi juga dengan perlindungan terhadap hak masyarakat dan pelaksanaan kewenangan lembaga penegak hukum yang tetap berdasarkan hukum.



Gambar 1. Hubungan Demokrasi terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Sumber: (Saputro, 2025), (Sofni, 2025), dan (Katrina *et al.*, 2025)

Berdasarkan diagram tersebut, dapat dilihat bahwa demokrasi memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum melalui partisipasi masyarakat serta pengawasan dan pembatasan terhadap kekuasaan. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya, kekuasaan pemerintah perlu dibatasi melalui prinsip legalitas, *checks and balances*, serta pengawasan yudisial dan administratif agar kewenangan tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepercayaan publik, lemahnya mekanisme pengawasan, praktik korupsi, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, serta hambatan struktural dan kultural. Oleh karena itu, demokrasi dan penegakan hukum perlu berjalan secara beriringan melalui partisipasi masyarakat, pengawasan terhadap kekuasaan, transparansi, dan akuntabilitas agar tercipta penegakan hukum yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa demokrasi memiliki keterkaitan yang erat dengan penegakan hukum di Indonesia. Penerapan prinsip demokrasi dapat terlihat melalui partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi tersebut perlu berjalan berdasarkan hukum dan konstitusi agar tetap sesuai dengan prinsip negara hukum. Demokrasi juga berpengaruh terhadap penegakan hukum melalui adanya pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan, sehingga kewenangan pemerintah dan lembaga negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, seperti konsistensi penerapan hukum, independensi lembaga penegak hukum, pengawasan terhadap kekuasaan, partisipasi masyarakat, serta berbagai kepentingan dalam kehidupan politik dan

pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi dan penegakan hukum perlu berjalan secara seimbang dengan didukung oleh penguatan lembaga hukum, transparansi, pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penerapan demokrasi tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi juga dapat mendukung terciptanya penegakan hukum yang sesuai dengan konstitusi, melindungi hak masyarakat, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, dan adil.

F. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, diperlukan upaya untuk memperkuat hubungan antara demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Lembaga penegak hukum perlu menjalankan kewenangannya secara konsisten berdasarkan hukum serta memperkuat mekanisme pengawasan agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi masyarakat juga perlu didorong melalui ruang yang terbuka untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan. Dengan adanya penguatan lembaga hukum, pengawasan terhadap kekuasaan, transparansi, serta partisipasi masyarakat, diharapkan pelaksanaan demokrasi dan penegakan hukum dapat berjalan secara seimbang sesuai dengan prinsip negara hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmasisya, V. and Fakultas, J. (2022) ‘“ Dharmasisya ” Jurnal Program Magister Hukum FHUI POLITIK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA’, 2(December).
- Irawan, O. *et al.* (2025) ‘Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia’.
- Katrina, S. *et al.* (2025) ‘Tantangan dan Peluang Reformasi Citra Penegakan Hukum di Indonesia: Menuju 2025 yang Transparan dan Akuntabel’, 4(2), pp. 1216–1220.
- Muhlashin, I. (2021) ‘Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia State’, pp. 87–100.
- Prayoga, I. L. (2026) ‘Tantangan demokrasi di Indonesia di era digital’, 4, pp. 253–259.
- Rahmaayu, S. *et al.* (2025) ‘Demokrasi dan Partisipasi : Analisis Peran Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan Publik Di Indonesia’, 4(November).
- Saputro, Y. A. (2025) ‘Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah’, 5(6), pp. 4975–4984.
- Sembiring, R. P. (2023) ‘Peran Hukum di Negara Demokrasi Indonesia’. Available at: <https://binus.ac.id/character-building/2023/02/peran-hukum-di-negara-demokrasi-indonesia>.
- Sofni, A. (2025) ‘Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara : Perspektif Hukum Umum dan Hukum Islam’, 1(1), pp. 1–7.
- Subechi, I. (2012) ‘Mewujudkan Negara Hukum Indonesia’, (9).
- Undari, S. and Mohamad, M. (2024) ‘Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110’, 5(September), pp. 110–116.